

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pengalaman sejumlah Negara, upaya mewujudkan bangsa yang maju ialah membentuk kualitas sumberdaya manusia (SDM). Pengembangan kualitas SDM menjadi tanggung jawab yang mutlak suatu Negara-bangsa (*nation state*) (Suryadi, Ace, 2012, hlm.1). Investasi SDM selalu diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu untuk mewujudkan ketahanan (*survival*), dan menghantarkan bangsa agar tumbuh dan berkembang (*development*) menuju kedewasaan, keadilan, dan kemakmuran (Suryadi, Ace, 2012, hlm.1). Di dalam Negara itu sendiri, investasi SDM bukan hanya tanggung jawab sektor pendidikan, akan tetapi tanggung jawab dari berbagai sektor terkait yang dilaksanakan di dalam suatu kesatuan konsep dan kebijakan yang integral. Di hampir semua Negara, sektor-sektor yang berkontribusi secara langsung untuk mewujudkan perkembangan kualitas SDM yaitu pendidikan, pelatihan, perbaikan gizi dan kesehatan, migrasi tenaga kerja, serta program-program sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Suryadi, Ace, 2012, hlm.1).

Dewasa ini, Indonesia sudah berada di dalam arena persaingan global. Oleh karena itu pembangunan nasional di masa datang harus menekankan pada pentingnya penyiapan kualitas SDM untuk mencapai keunggulan dan daya saing bangsa dalam era percuturan internasional. Pembangunan nasional dengan titik berat pada bidang ekonomi, misalnya harus tetap memberikan tekanan pada fungsi SDM sebagai kekuatan penggerak utama (*driving force*) bagi berbagai bidang pembangunan, termasuk bidang ekonomi, politik, sosial-budaya. SDM yang berkualitas akan mendorong suasana saling memperkuat, saling membentuk, saling terkait, dan saling keterpaduan antar berbagai bidang secara seirama, selaras dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh (Suryadi, Ace, 2012, hlm.3).

Tenaga kerja atau buruh serta lapangan pekerjaan merupakan bahasan yang menarik di Indonesia. Apalagi jika dikaitkan dengan demografi yang memiliki potensi dan peran besar dalam rangka pembangunan ekonomi secara nasional. Hampir setiap tahunnya, tenaga kerja atau buruh di Indonesia selalu turun ke jalan untuk menuntut kesejahteraan. (Ferri, Oscar, 2015).

Setiap tahunnya pemerintah selalu menaikkan UMP (upah minimum provinsi) yang dijadikan suatu acuan menentukan penghasilan bagi buruh. Namun kenyataannya, buruh selalu meminta kenaikan gaji yang lebih. Pada hari kamis tanggal 10 desember 2015, Ribuan buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi serikat buruh kembali turun ke jalan. Mereka berunjuk rasa untuk menolak formula upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Para buruh meminta pemerintah mencabut PP Nomor 78/2015 itu. Utamanya tentang rumusan kenaikan minimum yang dipengaruhi oleh inflasi ditambah Produk Domestik Bruto (PDB). "Cabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tolak formula kenaikan upah minimum, yakni inflasi ditambah PDB," ucap koordinator aksi dari pengeras suara di mobil komando di lokasi demo, Patung Kuda, Simpang Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Menurut Labor Institut Indonesia, bahwa untuk mengukur kesejahteraan tenaga kerja, yang harus diperhatikan ialah hal jumlah pemerataan upah/ penghasilan tenaga kerja. Karena pendapatan sangat berhubungan dengan lapangan pekerjaan, usaha, serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Semua pihak harus berusaha menyediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat memiliki penghasilan tetap agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu akses pendidikan yang mudah untuk dijangkau untuk semua kalangan. Biaya pendidikan sekecil apapun harus diprioritaskan. Selanjutnya adalah kualitas kesehatan yang meningkat dan merata disemua kalangan masyarakat. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan penghasilan dan pendidikan yang baik. Bisa dikatakan bahwa buruh saat ini belum sejahtera, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan beberapa kegiatan yang berupa peningkatan prakarsa dan penguatan masyarakat, perbaikan lingkungan alam dan perumahan, pembangunan usaha ekonomi, pembangunan lembaga keuangan, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya (Afrida, Kumajas, 2014).

Secara umum koperasi di Indonesia terbentuk atas dasar meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi. Namun, karena dalam membangun peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi, koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip tertentu.

Menurut Hatta (1994) (Subandi, 2010,) koperasi didirikan dari golongan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harga yang murah, itulah tujuannya. Pada koperasi lebih mendahulukan keperluan bersama-sama, bukan keuntungan pribadi.

Bagi anggota koperasi bentuk peminjaman akan sangat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Bentuk peminjaman juga dapat membantu anggota koperasi dalam menambah modal usaha atau investasi. Dari program simpan pinjam juga, anggota koperasi mendapat keuntungan yang berupa SHU (Sriwati, Endang, 2013, Hlm.238)

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 3 menjelaskan bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan pada anggota dan masyarakat, serta ikut membangun dalam sistem perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa disimpulkan bahwa koperasi adalah bentuk lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hadirnya Koperasi Keluarga Besar (KKB) NTP didirikan atas dasar kepentingan dan kebutuhan ekonomi yang sama dari para anggota. Semua usaha yang ada pada prinsipnya diarahkan dalam upaya memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Koperasi Keluarga Besar NTP memiliki program simpan pinjam, dimana tujuan dari program simpan pinjam ini untuk memberikan pinjaman baik untuk keperluan pribadi anggota maupun modal usaha anggota. Walaupun ada bunga dari pinjaman, namun alokasi bunga tersebut untuk dikelola kembali oleh pengurus koperasi agar koperasi terus berkembang. Dan juga Koperasi Keluarga Besar NTP memfasilitasi karyawan untuk menyimpan baik barang maupun uang, ada yang bersifat wajib dan bersifat swadaya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka peneliti melihat permasalahan tersebut, yaitu :

- 1.2.1 Penghasilan dan pengeluaran anggota/karyawan terkadang minus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 1.2.2 Koperasi Keluarga Besar NTP menyelenggarakan program simpan pinjam yang bertujuan untuk menanggulangi perekonomian karyawan PT NTP sebagai bentuk pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
- 1.2.3 Kepedulian dan respon karyawan yang sangat tinggi akan adanya koperasi keluarga besar NTP.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di koperasi Keluarga Besar NTP Kota Bandung, adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah “Fungsi Pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada Koperasi Keluarga Besar NTP?”. Lebih khusus penelitian ini dibatasi dalam menjawab pertanyaan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimanakah gambaran mengenai kesejahteraan para anggota sebagai hasil dari proses pemberdayaan di lingkungan Koperasi Keluarga Besar NTP Padjajaran Kota Bandung?
- 1.2.2 Bagaimanakah strategi, proses dan bentuk-bentuk pemberdayaan bagi para anggota dalam penyelenggaraan koperasi simpan pinjam pada Koperasi Keluarga Besar NTP Padjajaran Kota Bandung?
- 1.2.3 Faktor-faktor pendorong dan penghambat apakah yang dihadapi oleh Koperasi Keluarga Besar NTP Padjajaran Kota Bandung dalam pemberdayaan anggotanya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota pada koperasi keluarga Besar Nusantara turbin dan Propulsi. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1.3.1 Memperoleh gambaran mengenai kesejahteraan para anggota koperasi sebagai hasil dari proses pemberdayaan di lingkungan Koperasi Keluarga Besar NTP padjajaran Kota Bandung.
- 1.3.2 Memperoleh gambaran mengenai strategi, proses, dan bentuk-bentuk pemberdayaan bagi para anggota dalam penyelenggaraan koperasi simpan pinjam pada Koperasi Keluarga Besar NTP Padjajaran Kota Bandung.
- 1.3.3 Memperoleh gambaran faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi Koperasi Keluarga Besar NTP Padjajaran Kota Bandung dalam melaksanakan pemberdayaan anggotanya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan keilmuan pendidikan luar sekolah pada bidang pemberdayaan, kesejahteraan, khususnya kesejahteraan di PT.NTP Bandung, serta sebagai acuan penelitian mengenai “fungsi pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Keluarga Besar Nusantara Turbin dan Propulsi”.
- 1.4.2 Manfaat Praktik
  1. Menambahkan keilmuan Pendidikan Luar Sekolah dalam bidang pemberdayaan dan kesejahteraan.
  2. Sebagai bahan kajian bagi pihak struktur Koperasi Keluarga Besar NTP.
  3. Sebagai bahan kajian bagi penelitian lain yang berminat dengan meneliti objek yang sama menurut dimensi lain.

R. Dicky Pratomo, 2018

**FUNGSI PEMBERDAYAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KELUARGA BESAR NUSANTARA TURBIN & PROPULSI**

universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Sebagai saran dan masukan kepada struktur Koperasi Keluarga Besar NTP dalam meningkatkan kesejahteraan.

### **1.5 Struktur Organisasi**

Merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun 2015, berikut adalah struktur penulisan skripsi:

BAB I : Pada Bab ini menjelaskan tentang Pendahuluan, dengan pembahasan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Penulisan.

BAB II : Pada bagian ini membahas mengenai Teori dan Konsep pemberdayaan, kesejahteraan, dan koperasi yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III : Pada bagian ini memaparkan Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Pendekatan, Teknik Pengumpulan data, Kisis Penelitian.

BAB IV : Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian dan medeskripsikan hasil penelitian.

BAB V : Pada bagian ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan rekomendasi.